

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik simpulan :

1. Polresta Kota Padang menjalankan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan rekrutmen CPNS melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai proses rekrutmen yang sah, memperkuat patroli siber untuk mendeteksi modus penipuan daring, serta menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB guna memastikan informasi rekrutmen yang valid. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi risiko terjadinya penipuan.
2. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Polresta Kota Padang menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan dalam identifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Sebagai solusi, Polresta Kota Padang meningkatkan kapasitas patroli siber, memperluas kampanye penyuluhan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi. Upaya ini tidak hanya menekan angka penipuan tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi

masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik pada proses rekrutmen CPNS yang resmi.

B. Saran

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepolisian Resor Kota Padang untuk memperkuat kegiatan penyuluhan hukum secara berkesinambungan kepada masyarakat terkait modus penipuan dalam rekrutmen CPNS. Selain itu, patroli siber dan pelatihan internal bagi personel untuk penanganan kasus penipuan daring juga perlu ditingkatkan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi terkait rekrutmen CPNS melalui sumber resmi seperti situs web BKN atau instansi terkait. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan segala bentuk kecurangan yang dicurigai akan membantu kepolisian dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku secara lebih cepat dan tepat.
3. Disarankan Kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB, untuk memperkuat sistem keamanan dalam rekrutmen CPNS agar lebih transparan dan mengurangi celah

penipuan. Peningkatan koordinasi dengan kepolisian dalam penyediaan informasi terkait proses rekrutmen juga penting agar masyarakat memiliki akses pada informasi yang akurat, sehingga dapat meminimalisir potensi penipuan.

